

Judul : DPR Ngarep Ada Mekanisme Tindak Lanjuti Hasil Kunker
Tanggal : Minggu, 30 Juni 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Ngarep Ada Mekanisme Tindak Lanjuti Hasil Kunker

WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Rizki Sadig meminta pemerintah membuat mekanisme baku bagi para Anggota Dewan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja dan kunjungan spesifik yang dilakukan di berbagai daerah utamanya di daerah pemilihan (Dapil). Rizki meminta masalah ini diperhatikan sebab saat ini wadah untuk penyaluran aspirasi bagi Dewan tersumbat. Padahal DPR sedari awal telah bersumpah untuk memperjuangkan setiap aspirasi yang masuk ke dewan.

Ditegaskan politisi Fraksi PAN ini, penyaluran aspirasi merupakan hal legal dan diatur dalam Undang-Undang Kewenangan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau disingkat MD3.

"Menindaklanjuti berbagai hal yang berkaitan dengan dapil bahwa ini sudah diatur dalam Undang-Undang MD3 bahwa kita harus memperjuangkan konstituen kita. Sekarang kewenangannya ada tapi mekanismenya tidak ada," kata Rizki.

Rizki meminta mekanisme dewan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dari setiap kunker dan kunjungan spesifik ke dapil dan dalam rangka tugas kedewananan dicarikan solusinya. Dia tidak ingin aspirasi masyarakat yang masuk ke dewan tidak dapat tersalurkan padahal sejak diangkat para Anggota Dewan sudah bersumpah untuk memperjuangkan kepentingan konstituen di DPR.

"Jadi dibuatkan format usulan pemerintah nanti seperti apa karena anggota dewan itu sejak awal dilantik sudah bersumpah dalam jabatannya. Jadi kalau kita mengingkari ya dosanya kita tanggung bareng-bareng. Bukan cuma anggota (DPR) saja," tegas dia.

Hal senada dilontarkan

Wakil Ketua Banggar Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah. Menurutnya, pemerintah harus membuat mekanisme yang jelas dan legal terhadap setiap upaya dewan menindaklanjuti setiap kegiatan kunjungan kerja dan kunjungan spesifik dari Dewan.

"Kemarin kita minta supaya ada mekanisme untuk hasil kunker, kan ada serapan aspirasi. Lalu ada agregasi kepentingan politik. Artikulasinya ya di forum ini. Bagaimana ketika kita rumuskan, mekanismenya ditemukan di samping itu ada mekanisme untuk kita sebagai anggota DPR untuk menuangkan aspirasi dan melakukan agregasi politik," katanya.

Saat ini, kata dia, DPR kesulitan untuk menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat karena mekanisme untuk itu belum diatur secara rigat. Dia pun tidak berani memasukkan program aspirasi ke masyarakat karena khawatir malah berimbas pada persoalan hukum.

"Kami sekarang tidak berani. Sekarang minta Pak Bupati dibuatin proposal, kita ketakutan gara-gara proposal anggota Dewan keseret-seret. Sebab anggota DPR bisa saja dipanggil lantaran bupatinya kena hukum. Sementara DPR ini hanya memperjuangkan saja," katanya.

Anggota Komisi XI Achmad Hatari menambahkan, sebenarnya masalah penyaluran aspirasi ini sudah sering kali dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tapi tidak konkret. Padahal, payung hukumnya jelas yakni Undang-Undang MD3 dan turunan lainnya.

"Raker bersama Menkeu atau pun Ketua Banggar sudah sering kali disampaikan ini bukan hanya berdasar Undang-Undang MD3 tapi juga sumpah jabatan. Jadi kewenangan ada tapi mekanisme nggak punya," keluhnya. ■ KAL